`

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Instansi Pemerintahan harus mempunyai sumber daya manusia yang berkualitas dan mempunyai keahliaan yang sesuai dibidangnya. Untuk mempunyai sumber daya manusia yang berkualitas dan mempunyai keahliaan yang sesuai dalam hal ini guna mendapatkan hasil yang optimal dan memuaskan. Pengelolaan sumber daya manusia yang baik harus dilakukan dengan baik, teratur, terarah dan terorganisir. Karena dengan pengelolaan yang baik akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dengan keahliaan dibidangnya, dan agar mampu menerima segala perubahan baik dari dalam ataupun dari luar.

Menurut Handoko (Sinambela 2016:334), Disiplin adalah kesediaan seseorang yang timbul dengan kesadaran sendiri untuk mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku dalam organisasi. Menegakan kedisiplinan kerja merupakan upaya untuk meningkatkan kinerja para pegawai untuk meningkatkan kinerja tersebut dibutuhkan kesadaran dari diri masing-masing pegawai, Meningkatkan kinerja pegawai secara optimal dibutuhkan kedisiplinan secara teratur salah satunya dapat dilihat dari segi absensi pegawai, pegawai yang mempunyai disiplin kerja yang tinggi akan bekerja sesuai dengan tanggung jawab yang telah diberikan kepadanya hal tersebut bisa dilihat dengan tidak mencuri waktu untuk melakukan hal-hal di luar pekerjaan.

Sebelum di berlakukannya sistem absensi elektrik (*finger print*) setiap pegawai melakukan absen manual hanya pada akhir bulan saja ketika absen akan di rekap sehingga kedisiplinan para pegawai tidak dapat dikontrol selain itu kelemahan dari absensi manual juga dapat di tiru sehingga absensi bisa dilakukan oleh siapa saja dan pegawai bisa masuk dan pulang kapan saja dan mecuri waktu untuk melakukan hal-hal di luar pekerjaan pada saat jam kerja. Setelah diterapkannya absensi elektrik (*Fingerprin*t) ini diharapkan dapat mendorong para pegawai agar lebih disiplin lagi dan mencapai target dalam pencapaian kerja dan prestasi. Dengan diterapkannya absensi elektrik (*finger print*) ini yang dimulai pada tanggal 04 Januari 2018 para pegawai Dinas Perumahan, Kawasan

Penerapan Sistem..., Riska Purnamasari, Fakultas Ekonomi 2019

Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kota Bekasi mulai absen dengan sidik jari, sensor wajah dan mata masing masing setiap pegawai, masuk dan pulang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dengan diterapkannya absensi elektrik (*Fingerprint*) ini diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan para pegawai yang ada di DPKPP Kota Bekasi, selain itu dengan diterapkannya absensi elektrik ini agar sebanding dengan Tunjangan Penambahan Pegawai (TPP) yang diberikan kepada PNS dan TKK Pembayaran TPP yang akan diberikan diukur dari kedisiplinan para pegawai dan kinerja sehari-hari dimulai dari jam berapa mereka datang dan jam berapa mereka pulang selain itu dengan di terapkannya absensi fingerprint ini pegawai jadi lebih disiplin karena lebih dituntut lagi untuk datang dan pulang sesuai waktu yang telah ditentukan. Dengan diterapkannya absensi elektrik (*Fingerprint*) ini memiliki pengaruh yang baik bukan hanya untuk pegawai tapi juga untuk operator absen karena absensi ini berupa sistem yang bekerja secara online sehingga mudah dipantau oleh operator karena langsung terhubung ke komputer operator sehingga dapat terpantau dan memudahkan operator untuk merekap absen setiap bulannya. Untuk meningkatkan kinerja itu sendiri dibutuhkan sikap disiplin kerja, Disiplin merupakan sikap yang sangat diperlukan oleh setiap orang dalam usaha untuk meningkatkan kinerja guna mencapai tujuan yang akan dicapai, penerapan disiplin kerja dalam instansi pemerintahan sangat diperlukan guna memberikan konstribusi yang positif dalam mencapai tujuan, dalam hal ini suatu instansi pemerintahan perlu memperhatikan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi disiplin kerja pegawai, dalam hal ini diperlukan peranan instansi pemerintah yang bersangkutan dalam meningkatkan disiplin kerja para pegawainya.

Jika ketidak disiplinan ini tetap dibiarkan akan berdampak pada penurunan kinerja di DPKPP Kota Bekasi sementara tunjangan yang di berikan harus sesuai dengan tingkat disiplin dan kinerja yang dilakukan.

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai Penerapan Sistem Absensi Elektrik (*Finger Print*) Dalam Rangka Meningkatkan Disiplin Kerja Pegawai di Instansi Pemerintahan Dinas Perumahan,Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi.

Apabila ada aparatur yang tidak disiplin serta tidak bekerja secara maksimal sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan maka Wali Kota Bekasi melalui OPD masing-masing mempunyai kewenangan untuk :

1. Memberikan teguran secara lisan;
2. Memberikan teguran secara tertulis secara berjenjang, terdiri dari teguran tertulis 1 sampai dengan 3 (3 kali teguran tertulis)
3. Kemudian dibuat surat pernyataan tidak puas melalui majelis kode etik tingkat OPD;
4. Pernyataan tidak puas tersebut dari kepala OPD disampaikan kepada BKPPD, untuk kemudian oleh BKPPD di tindak lanjut melalui mejelis kode etik untuk memutuskan sanksi yang diberikan.

Berikut ini table presentase pemotongan tunjangan penambahan penghasilan :

Tabel 1.1 Presentase Pemotongan Tunjangan Penambahan Pegawai

Waktu pulang lebih cepat	Satuan	Besaran Potongan
16-60	Menit	0,25 %
61-120	Menit	0,5 %
121-180	Menit	1 %
>181	Menit	1,5 %

Sumber : Peraturan Wali Kota Nomor 06 Tahun 2017 tentang Ketentuan Hari Kerja dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

Keterangan :

1. Waktu pulang lebih cepat 16 menit sampai dengan 60 menit, maka akan dikenakan pemotongan sebesar 0,25 %.
2. Waktu pulang lebih cepat 61 menit sampai dengan 120 menit, maka akan dikenakan potongan sebesar 0,5 %.
3. Waktu pulang lebih cepat 121 menit sampai dengan 180 menit, maka akan dikenakan potongan sebesar 1 %.
4. Dan waktu pulang lebih cepat >181 menit dan tidak absen figer maka akan dikenakan potongan sebesar 1,5 % untuk setiap kali masuk kerja.

Jika tidak masuk kerja atau tanpa keterangan maka akan dikenakan potongan sebesar 5 %, tetapi apabila ada keterangan yang sah atau bukan kedinasan disertai bukti surat ijin yang ditandatangani oleh atasan langsung maka

potongan berlaku 2 % untuk setiap tidak masuk kerja. Karena pemotongan tunjangan dinamis dikenakan kepada ASN yang datang terlambat, ASN yang pulang lebih awal, ASN yang tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah dan ASN yang tidak membuat laporan kinerja. Dengan adanya sistem ini, kembali lagi kepada aparatur sendiri yang menentukan berapa jumlah penghasilan yang mereka terima setiap bulannya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut: Apakah Penerapan Sistem Absensi Elektrik (*Fingerprint*) Dalam Rangka Meningkatkan Disiplin Kerja Pegawai Di Instansi Pemerintahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan (DPKPP) Kota Bekasi dapat meningkatkan disiplin kerja pegawai ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Penerapan Sistem Absensi Elektrik (*Fingerprint*) Dalam Rangka Meningkatkan Disiplin Kerja Pegawai Di Instansi Pemerintahan Dinas Perumahan Kawasan, Permukiman Dan Pertanahan (DPKPP) Kota Bekasi

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Dalam penelitian ini dapat digunakan untuk sarana menambah wawasan mengenai penerapan Sistem Absensi Elektrik(*Finger Print*) dan tentang disiplin dalam berkerja.

2. Bagi Akademik

Sebagai penilaian kepada mahasiswa dalam memahami Penerapan Sistem Absensi Elektrik (*Fingerprint*) Dalam Rangka Meningkatkan Disiplin Kerja Pegawai Di Instansi Pemerintahan Dinas Perumahan Kawasan, Permukiman Dan Pertanahan (DPKPP) Kota Bekasi.

`

3. Bagi Instansi Pemerintahan

Sebagai masukan untuk mengetahui apakah penerapan sistem absensi elektrik(finger print) ini dapat meningkatkan disiplin.

1.5 Batasan masalah

Berdasarkan masalah diatas peneliti memfokuskan pada Penerapan Sistem Absensi Elektrik (Finger Print) Dalam Rangka Meningkatkan Disiplin Kerja Pegawai di Instansi Pemerintahan Dinas Perumahan,Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori

Dari bab ini terdiri dari landasan teori yang menguraikan teori-teori yang digunakan sebagai tinjauan pustaka/landasan teori dalam menganalisa batasan masalah yang ada kemudian kerangka berfikir dan hipotesis.

Bab III Metodologi Penelitian

Pada bab ini menggunakan tentang desain penelitian, jenis, waktu dan tempat penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini membahas objek penelitian gambaran umum Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi(DPKPP)Kota Bekasi dan hasil analisis dalam penelitian yang berisi pertanyaan pertanyaan atau jawaban yang timbul dalam perumusan masalah.

BAB V Kesimpulan Dan Implikasi Manajerial

Pada bab ini merupakan penutupan dari penulisan yang terdiri dari kesimpulan atau hasil analisis.